

OPERATIONAL MANAGEMENT OCEAN FISHING PORT OF BELAWAN NORTH SUMATERA PROVINCE

By :

Yuliana¹⁾, Jony Zain²⁾, Syaifuddin³⁾

Yulianalia29@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in 17-31 October 2016 in the ocean fishing port Belawan. This research aims to examine operational management of Fishing Port Ocean the most important about elements and functions application operational management. The study was conducted using a survey method. The data analysis is done by giving a description, explanation and discussion in accordance with the purpose of research. The study was conducted by taking the primary data and secondary data. Based on the research that the relationship port in private with PPS Belawan only as a partner of The Port in private of just issuing licenses provided in the ship's departure PPS Belawan to port form of license controlling interest, land rents and land ports janitorial services.

Keyword : Operational management, Port in private, Belawan fishing port.

¹⁾ Student of Fisheries and Marine Science Faculty, Riau University

²⁾ Lecture of Fisheries and Marine Science Faculty, Riau University

PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap yang perlu terus dikembangkan baik manajemen maupun sumberdaya manusianya. Dengan demikian pelabuhan perikanan diharapkan dapat menjadi *center of excellence* bagi perkembangan perikanan, pusat pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, serta sebagai pusat pembinaan nelayan dan industri pengelola hasil perikanan.

Salah satu kawasan yang bergerak dalam bidang perikanan di Provinsi Sumatera Utara adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPS Belawan). Pelabuhan tersebut merupakan satu-satunya Pelabuhan Perikanan Tipe A di Pantai Timur Sumatera. PPS Belawan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, mengembangkan wiraswasta perikanan serta memasang dan atau mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan, memperkenalkan dan mengembangkan teknologi hasil perikanan.

Fasilitas yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terdiri dari Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional, dan Fasilitas Penunjang. Fasilitas-fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tersebut sebahagian besar masih dalam kondisi baik, namun juga terdapat beberapa fasilitas yang keadaannya kurang baik.

PPS Belawan mempunyai keunikan tersendiri, berbeda dengan pelabuhan lainnya. PPS Belawan memiliki sejumlah

tangkahan yang beroperasi di dalam wilayah pelabuhan. Sedangkan pelabuhan lainnya tidak demikian seperti PPN Sibolga, dimana tangkahan-tangkahan berada di luar lokasi pelabuhan sehingga menjadi pesaing bagi PPN Sibolga.

Tangkahan-tangkahan yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat melayani aktivitas-aktivitas pengisian perbekalan, pendaratan hasil tangkapan, pengolahan hasil tangkapan dan pemasaran hasil tangkapan. Aktivitas-aktivitas tersebut hampir sama dengan aktivitas-aktivitas tangkahan di Sibolga (Sinaga,1995).

Manajemen pelabuhan perikanan adalah suatu seni dan ilmu tentang perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan terhadap pelabuhan perikanan serta penggunaan sumberdaya organisasi pelabuhan agar tujuan organisasi pelabuhan perikanan yang telah ditentukan dapat tercapai (Dirjen Perikanan, 1982). Manajemen operasional adalah sebuah usaha pengelolaan dengan maksimal terhadap penggunaan pada semua faktor produksi yang tersedia, baik itu dari tenaga kerja atau sumber daya manusia, peralatan, raw material, mesin dan faktor produksi yang lainnya didalam proses transformasi untuk dapat menjadi berbagai ragam produk jasa atau barang.

Perumusan Masalah

PPS Belawan memiliki banyak tangkahan yang terdapat di dalam kawasannya. Tangkahan tersebut melaksanakan aktivitas-aktivitas yang seharusnya di lakukan oleh PPS Belawan. Keberadaan tangkahan tersebut di duga memberikan perbedaan dalam pengelolaan operasional PPS Belawan di bandingkan pelabuhan lainnya yang ada di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dan permasalahan yang dihadapinya.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk pengembangan Manajemen Operasional PPS Belawan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016, di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Sumatera Utara.

Objek dan Alat Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Sumatera Utara dan tangkahan –tangkahan yang ada di dalamnya. Sedangkan alat yang digunakan antara lain kamera untuk mengambil gambar dan daftar isian berupa lembaran quisioner untuk mencatat data dan hasil wawancara dan alat-alat tulis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yakni melakukan pengamatan langsung ke Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan dan tangkahan-tangkahan yang ada di dalamnya, dan mengumpulkan informasi serta melakukan wawancara langsung dengan responden

Prosedur Penelitian.

1. Pengumpulan Data

Data yang kumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yaitu dengan melakukan wawancara, pengamatan dan mencatat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kantor-kantor ataupun instansi terkait berupa literatur-literatur yang mendukung. Wawancara dilakukan langsung pada sumber data dalam hal ini yang menjadi responden adalah pihak pengelola pelabuhan 2 orang, kepala pelabuhan dan pengawas lapangan, pihak pengelola tangkahan 3 orang, nelayan 3 orang, pekerja 3 orang, pedagang 2 orang dan masyarakat sekitar

serta instansi lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait di PPN Belawan berupa laporan tahunan ataupun dalam bentuk lainnya.

Menurut penggunaannya data yang dikumpulkan tersebut dibedakan atas data utama dan penunjang. Data utama merupakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi manajemen operasional di PPS Belawan, sedangkan data penunjang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi tangkahan yang terdapat di Belawan.

Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

1. PPS Belawan
 - Struktur Organisasi (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab, dll).
 - Fasilitas (Jenis, Ukuran/Kapasitas, Fungsi, dan Kondisi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tangkahan PPS Belawan

Tangkahan PPS Belawan memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan pelabuhan lainnya. Tangkahan di PPS Belawan berdiri duluan sebelum pelabuhan. PPS Belawan memiliki sejumlah tangkahan yang beroperasi di dalam wilayah pelabuhan. Terdapat 26 daftar gudang / tangkahan di PPS Belawan antara lain :

1. PT. ALAM LAUT SEJAHTERA
2. BINCUAN
3. MITRA BELAWAN FISHING
4. SUMBER LAUT
5. TEMPAT PELELANGAN IKAN
6. GH
7. PUTRA BEROMBANG PERKASA
8. SUMBER UTAMA
9. WIRA SAKTI
10. B 2
11. SUMBER LAUT
12. PT. UNITED
13. PS. KARYA AGUNG LESTARI JAYA

- Aktivitas PPS Belawan (Jenis, Proses, Pelaku dan Peralatan yang digunakan).

2. Tangkahan

- Hubungan dengan PPS Belawan.
- Sistem Pelaporan data ke PPS Belawan

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dinarasikan dan ditabulasikan dalam bentuk tabel selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan uraian, penjelasan dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang dianalisis adalah data yang menyangkut tentang pengelolaan aktivitas di PPS Belawan dan hubungannya dengan aktivitas tangkahan-tangkahan PPS Belawan.

14. KARUNIA AGUNG
15. MITRA LAUT
16. BENGKEL HOSENG CHAN
17. PT. PUTRI INDAH
18. ABADI JAYA
19. CHC
20. TGC
21. PT. MITRA NAGA
22. PT. ASSA (COLD STORAGE)
23. HORAS
24. JAYA HALILINTAR
25. PEKONG
26. JAYA ABADI

Kebanyakan kapal-kapal di PPS Belawan mendaratkan hasil tangkapannya di tangkahan perusahaan masing-masing. Perusahaan mengelola hasil tangkapan dalam bentuk ikan segar maupun ikan beku yang dipasarkan di daerah Sumatera Utara maupun diekspor keluar negeri.

Manajemen Operasional PPS Belawan Penyaluran Logistik Kapal

Kebutuhan utama logistik kapal untuk melaut meliputi BBM, Es, Garam, Oli dan Bahan makanan. Jumlah kebutuhan logistik umumnya disesuaikan dengan lamanya hari melaut, sebagai contoh untuk jenis kapal Pukat Ikan (Fish Net)

melakukan operasi selama 15- 25 hari per trip kapal sehingga memerlukan logistik kapal yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan jenis alat tangkap lainnya dan kapasitas yang sama.

Kesyahbandaran Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 08/MEN/2012 tanggal 20 April 2012, tentang Kepelabuhan Perikanan Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan yang diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan pelayaran, ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan oleh Direktur Jenderal. Syahbandar di pelabuhan perikanan melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala Pelabuhan Perikanan setempat. Syahbandar mempunyai tugas dan wewenang :

- menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan
- mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- mengawasi pemanduan;
- mengawasi pengisian bahan bakar;
- mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;

melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan;

- memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
- menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
- memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan

Kegiatan kesyahbandaran perikanan hingga akhir tahun 2015 antara lain berupa : kegiatan cek fisik kapal dari aspek keselamatan pelayaran dan alat penangkapan, aspek teknis dan nautis serta pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta pengiriman laporan rutin bulanan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Up. Direktur Pelabuhan Perikanan. Penerbitan SPB untuk kapal perikanan telah dilakukan oleh syahbandar perikanan PPS Belawan.

Berbagai upaya untuk menyempurnakan kegiatan Operasional Kesyahbandaran dengan cara antara lain :

1. Berkoordinasi dengan kantor ADPEL Utama Belawan beserta syahbandar umum;
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI AL, POLAIR, dan Dinas Perikanan);
3. Meningkatkan personil baik kualitas dan kuantitas serta melengkapi sarana dan keperluan administrasi lainnya.

4. Pengadaan kapal Syahbandar dan pembangunan menara Syahbandar.

Selain Syahbandar yang ada di Belawan, ada 2 Syahbandar lagi yang berada dibawah pembinaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yaitu:

1. Syahbandar Pelabuhan Swasta di Batam.
2. Syahbandar Pelabuhan Pantai di Tanjung Balai.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Produk perikanan yang dapat diperbolehkan masuk ke Uni Eropa adalah produk perikanan yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) atau *Catch Certificate* . Yang dimaksud dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Cath Certificate*) adalah Surat Keterangan tentang asal muasal ikan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk sebagai otoritas kompeten yang menerangkan bahwa hasil tangkapan ikan dapat tertelusuri dan bukan dari kegiatan *Ilegal , Undereported and Underegulated (IUU) Fishing* .

Beberapa pendukung SHTI antara lain sebagai berikut:

1. Lembar awal sertifikat hasil tangkapan ikan;
2. Lembar turunan sertifikat hasil tangkapan ikan;
3. Lembar turunan sertifikat hasil tangkapan ikan yang disederhanakan.

Perizinan Kapal Perikanan (SIPI dan SIKPI)

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut serta mengakselerasi admintrasi perizinan usaha penangkapan ikan kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan dan / atau pengangkutan ikan terutama bagi kapal dengan ukuran diatas 30-60 GT, maka diperlukan suatu acuan bagi Kepala Dinas Provinsi dan kepala UPT Pelabuhan Perikanan dan pelaksanaan perpanjangan

SIPI dan SIKPI tersebut. Dengan adanya surat keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.36/Kep-DJPT/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Petunjuk teknis perpanjangan SIPI dan SIKPI kapal perikanan yang berukuran diatas 30 GT sampai dengan 60 GT oleh kepala dinas perikanan provinsi atau Kepala Unit Pelaksana Teknis pelabuhan perikanan, maka tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2013 telah dilaksanakan launching percepatan perizinan bagi kapal perikanan dengan ukuran tersebut diatas yang beroperasi di kawasan PPS Belawan.

Pelaksanaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

PIPP di PPS Belawan dikelola oleh 3 (tiga) orang petugas khusus, sedangkan untuk petugas pengumpul data atau enumerator dibantu oleh 24 (dua puluh empat) orang personil, selain melakukan tugas utamanya. Pelaksanaan operasional PIPP selama ini sudah berjalan secara baik namun terdapat beberapa kendala teknis yang sering ditemukan antara lain disebabkan karena : perangkat lunak dari aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) khususnya *software* dan *web server* atau *jaringan internet* sering terjadi gangguan, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pengiriman data ke pusat.Selain itu perlu juga dilakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap personil yang menangani. Pada tanggal 03 Desember 2015 telah dilakukan kegiatan konektifitas dan integritas PIPP di Hotel Antares Medan dan narasumber dari kantor pusat. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar petugas PIPP lebih memahami apa tugas dan tanggung jawabnya dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada.

Investasi di Pelabuhan Perikanan

Jumlah pengusaha yang memanfaatkan lahan dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, tercatat sebanyak 130 (seratus tiga puluh) perusahaan dengan berbagai jenis usaha, antara lain: Unit Penangkapan dan

Pengolahan Ikan, Cold Storge, APMS, SPDN, AKR, Pabrik Es, Bengkel Bubut, Tuasan, BAP, Restoran/kantin, Bilyard, Dock Tradisional dan lain-lain. Seluruh perusahaan di atas kontrak perjanjian pemanfaatan lahannya langsung dengan Perum Prasarana Perikanan Cabang Belawan sebagai pemilik asset sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor : 759/KMK.013/1992, tentang Penetapan Modal Awal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

Dari 130 (seratus tiga puluh) perusahaan yang ada sebanyak 24 (dua puluh empat) diantaranya bergerak di bidang penangkapan dan pengolahan ikan. Memperhatikan keragaman jenis usaha dan aktivitas dari pengusaha dan masyarakat perikanan yang cukup variatif dan dinamis, menggambarkan bahwa kehadiran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan selaku pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap cukup memberi nuansa baru dan makna bagi akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah, serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Hubungan PPS Belawan dengan Tangkahan

Tangkahan yang ada di dalam kawasan PPS belawan mengikuti aturan PPS Belawan salah satunya seperti melaporkan sebelum keberangkatan kapal dan kedatangan kapal, biar mendapat izin pembongkaran. Sistem pelaporan dari tangkahan ke PPS belawan berupa :

1. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK)
2. Surat persetujuan berlayar (SPB)
3. Log book

Sistem pelaporan tersebut di laporkan sebelum keberangkatan kapal dan kedatangan kapal yang di terbitkan oleh pihak pelabuhan. Tangkahan PPS Belawan di kelola oleh orang tangkahan tersebut, PPS Belawan tidak mengatur aktivitas tangkahan, karena tangkahan tersebut memiliki unit-unit sendiri.

Sedangkan orang tangkahan datang ke PPS Belawan untuk mendapatkan surat-surat persetujuan, persyaratan dan perizinan berlayar. Hubungan tangkahan dengan PPS Belawan hanya sebagai mitra kerja. Surat izin yang di berikan PPS Belawan ke tangkahan berupa surat izin kepemilikan, sewa lahan, dan jasa kebesihan lahan pelabuhan. Lahan yang berada di tangkahan semuanya milik pelabuhan, pengusaha tangkahan hanya memakai saja, tidak ada hak milik pengusaha tangkahan tersebut.

Pembahasan

Aktivitas yang terjadi di PPS Belawan mulai dari proses kedatangan kapal pada alur pelayaran dilengkapi dengan rambu-rambu navigasi yang berguna sebagai penunjuk arah bagi kapal-kapal yang akan berlabuh di dermaga pelabuhan. Dari data yang diperoleh sebagian besar kapal yang beraktivitas di PPS Belawan berukuran antara 20-30 GT yakni 295 unit dan juga terdapat kapal diatas 100 GT dengan jumlah 51 unit.

Kapal-kapal yang dilayani di PPS Belawan tidak mencapai 26 unit/hari hal ini disebabkan karena pada umumnya kapal-kapal perikanan sudah mempunyai tangkahan masing-masing. Jumlah ikan yang didaratkan pada umumnya para nelayan langsung menjual hasil tangkapannya di tengah laut atau membawa langsung ketangkahan. Dengan jumlah tersebut maka PPS Belawan belum setara dengan armada yang ditampung oleh Pelabuhan Perikanan Tipe A yang mampu menampung ≥ 100 kapal perikanan atau jumlah ≥ 6.000 GT sekaligus oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEPMEN/10/2004.

Tangkahan merupakan dermaga milik swasta yang telah memiliki izin-izin tertentu oleh pemerintah setempat, yang digunakan untuk mendukung aktivitas di dalam (khususnya aktivitas bongkar muat kapal perikanan). Tangkahan memiliki fungsi yang sama dengan pelabuhan perikanan namun lingkungnya masih kecil

karena aktivitas tangkahan tergantung pada fasilitas yang ada pada tangkahan tersebut.

Tangkahan di PPS Belawan berdiri duluan sebelum pelabuhan. PPS Belawan memiliki sejumlah tangkahan yang beroperasi di dalam wilayah pelabuhan. Terdapat 26 daftar gudang / tangkahan di PPS Belawan. Sedangkan tangkahan-tangkahan lain umumnya berada diluar Pelabuhan Perikanan sesuai dengan hasil penelitian Situmorang (2012) yang menyatakan tangkahan Lautan Mas Kota Sibolga berada di sekitar Pelabuhan Perikanan, tangkahan ini berdiri pada tahun 1990 memiliki badan hukum sendiri (C.V).

Tangkahan PPS Belawan memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan pelabuhan lainnya. Tangkahan-tangkahan tersebut umumnya mempunyai aktivitas lebih besar dibandingkan dengan PPS Belawan. Aktivitas termasuk salah satu faktor penunjang pengelolaan suatu tangkahan. Aktivitas yang dilakukan di tangkahan PPS Belawan adalah segala aktivitas yang bergerak di bidang perikanan, Pelayanan kapal perikanan, pendaratan hasil tangkapan, dan pemasaran hasil tangkapan. Sebelum pihak tangkahan melakukan aktivitas, nelayan harus melaporkan kedatangan kapal ke pihak pelabuhan atau syahbandar untuk menyampaikan tujuan kedatangan kapal seperti untuk tambat, bongkar dan berlabuh. Proses pembongkaran hasil tangkapan di lakukan oleh pihak tangkahan itu sendiri bersama ABK kapal tersebut. Pihak pelabuhan tidak mengatur aktivitas yang terjadi di tangkahan.

Fasilitas yang dimiliki tangkahan PPS Belawan masih belum lengkap, yang seharusnya untuk lebih memperlancar aktivitas perikanan yang berlangsung di tangkahan, hendaknya tangkahan memiliki, fasilitas penanganan ikan, tempat perbaikan kapal (bengkel, *slipway*), tangki bahan bakar dan alat komunikasi. Fasilitas fungsional yang di miliki dari masing-masing tangkahan hanya berupa

tempat pelelangan ikan yang di sebut juga dengan pelantar.

Untuk kebutuhan melaut pihak tangkahan masih mengandalkan jasa dari pihak PPS Belawan, seperti pengadaan BBM dan es. Untuk pengadaan BBM berupa solar tangkahan harus menghubungi pihak pelabuhan dan pihak pelabuhan menghubungi pihak Pertamina untuk mengantar solar dengan menggunakan truk tangki.

Hubungan tangkahan dengan PPS Belawan hanya sebagai mitra kerja. Pihak Pelabuhan hanya mengeluarkan Surat izin keberangkatan kapal yang di berikan PPS Belawan ke tangkahan berupa surat izin kepemilikan, sewa lahan, dan jasa kebersihan lahan pelabuhan. Lahan yang berada di tangkahan semuanya milik pelabuhan, pengusaha tangkahan hanya menyewa lahan, tidak ada hak milik pengusaha tangkahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tidak terlepas dari permasalahan atau hambatan-hambatan yang timbul. Secara substansional sudah berjalan dengan baik dan Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi

Tangkahan PPS Belawan memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan pelabuhan lainnya. Tangkahan di PPS Belawan berdiri duluan sebelum pelabuhan. PPS Belawan memiliki sejumlah tangkahan yang beroperasi di dalam wilayah pelabuhan. Terdapat 26 daftar gudang / tangkahan di PPS Belawan.

Hubungan tangkahan dengan PPS Belawan hanya sebagai mitra kerja. Surat izin yang di berikan PPS Belawan ke tangkahan berupa surat izin kepemilikan, sewa lahan, dan jasa kebersihan lahan pelabuhan. Lahan yang berada di tangkahan semuanya milik pelabuhan,

pengusaha tangkahan anya memakai saja, tidak ada hak milik pengusaha tangkahan tersebut.

Saran

Untuk pengembangan PPS Belawan maka di harapkan supaya kegiatan manajemen operasionalnya di tingkatkan dengan melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Perikanan agar dapat memberikan pelayanan prima bagi nelayan dan pengusaha perikanan setempat serta menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga seluruh aktivitas yang ada dapat di jalankan dengan baik.

Untuk kelancaran pengelolaan dan aktivitas yang di lakukan pada PPS Belawan, sangat perlu di bangun dan di perbaiki fasilitas-fasilitas yang di perlukan tangkahan supaya menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrizal, D. 2000. Manajemen Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan Kotamadya Medan Sumatera Utara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Pekanbaru. (Tidak diterbitkan).
- Ayodhyoa, A.U. 1975. Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan. Bagian Penangkapan Ikan. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor.
- Delpani, B, 2005. Manajemen Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangkan Belitung. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Pekanbaru. 63 hal (tidak diterbitkan).
- Dirjen Perikanan.1982. Manajemen Pelabuhan Perikanan. Direktorat Bina Prasarana. Tegal. 25 hal
- Dirjen Perikanan Tangkap, 1994. Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan . Direktorat Bina Prasarana. Jakarta. 162 hal.
- Handoko, H. T. 1994. Manajemen 2 BPFE-UGM. Yogyakarta. 300 hal
- Hasibuan, H. M. S. P., 2002. Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Revisi. Bumi aksara. Jakarta 271 hal.
- Kramadibrata, S. 1998. Perencanaan Pelabuhan. Ganesha Exact Bandung. 480 hal.
- Lestari, J. A., 2016. Aktivitas Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Banda Aceh. Laporan Praktek Magang Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 45 hal (tidak diterbitkan).
- Lubis, E. 2002. Pengantar Pelabuhan Perikanan Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor 72 hal.
- Murrdiyanto, B. 2002. Pelabuhan Perikanan. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor . 142 hal.
- Parlaungan, R. 1999. Intensitas Pendaratan Ikan dan Kegiatan Lainnya Di Pelabuhan

- Perikanan Nusantara Sibolga Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Perikanan Universitas Satya Negara Indonesia. Jakarta (tidak diterbitkan).
- Rahmat. A, 2014. Efisiensi Waktu Pengisian Pembengkakan Terhadap Waktu Tambat Kapal Perikanan Bagan Perahu Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 68 hal (tidak diterbitkan).
- Rietveldt, J. C., 1979. Ilmu Ekonomi Perrusahaan (Ilmu Management). Lembaga Penerbit Faakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. 80 hal.
- Rukmini. 2003. Manajemen Produksi Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 44 hal.
- Safarruddin, 1999. Manajemen Galangan Kapal Perikanan di kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas. Riau. Pekanbaru 54 hal (tidak diterbitkan)
- Sinaga, S. 1995. Studi Tentang Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Provinsi Sumatera Utara. Skripsi pada Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor 993 Hal (tidak diterbitkan).
- Sinaga, Z. 2004. Peranan Tangkahan Di Belawan Dalam Perkembangan Perikanan Di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru 65 hal. (tidak diterbitkan).
- Supriyatno, Y., 1993.. Fungsi dan Peranan PPI Panganaraan Kabupaten Ciamis Jawa Barat terhadap Usaha Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Nelayan. Skripsi Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor (tidak diterbitkan)
- Syawaluddin, 2004. Manajemen Operasional Pangkalan Peendaratan Ikan Dumai. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru 47 hal. (tidak diterbitkan).
- Ulfa.M. 2005 Manajemen Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing. skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Pekanbaru. 69 hal. (tidak diterbitkan)
- Yusrizal. 2003. Studi Tentang Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Kemungkinan Pengembangannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru (tidak diterbitkan).

Pertanian Bogor (ITB). Bogor
(tidak diterbitkan).

Widiyanti, N. 1994. Manajemen
Koperasi. Rineka Cipta. Jakarta
211 hal.

Wirabowo, A. 1991. Pengkajian Struktur
Organisasi Perum Perikanan
Samudra. Direktorat Jendral
Perikanan Samudra Jakarta.
Jakarta. 32 hal.

Zain, J., 2002. Studi Aktivitas Tangkahan
dan Pengaruh Terhadap
Operasional Pelabuhan
Perikanan Nusantara Sibolga.
Sumatera Utara. Tesis pada
Program Pasca Sarjana, Institut